



MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS KELAS INKLUSI DI SMPS INKLUSI TPA (TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN) JEMBER

Ayu Zaironi Fauziyah, Feni Selfiana, Sintia Ayu Lestari, Hayisul Imam Sukron
dan Rofiq Hidayat

Manajemen Pendidikan Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
ayuzaironifauziyah03@gmail.com, feniselfiana5@gmail.com, sintiaayul07@gmail.com,
ayisul045@gmail.com, Rofiqhidayat@uinkhas.Ac.Id.

Abstrak

Manajemen layanan khusus kelas inklusi adalah strategi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan lingkungan belajar di mana siswa dengan beragam kebutuhan khusus mendapatkan pengajaran yang sama dengan siswa umum lainnya di dalam satu kelas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kelas inklusi di SMPS TPA Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Subyek penelitian melibatkan kepala sekolah, guru pembimbing khusus, dan siswa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Manajemen khusus kelas inklusi dalam tahap perencanaan memanfaatkan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan kelas. Pengorganisasian di kelas inklusi bertujuan memastikan struktur efektif dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada semua siswa. Dalam pelaksanaan kelas inklusi, tidak terlepas dengan keberadaan Standar Operasional Pendidikan (SOP) karena SOP tersebut memastikan kelancaran proses pembelajaran di kelas inklusi sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Serta pengendalian di kelas inklusi melibatkan pengawasan dan peran kepala sekolah, bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran.

Kata kunci : manajemen layanan khusus kelas inklusi, anak berkebutuhan khusus

Abstract

Management of special services for inclusive classes is a strategy that focuses on managing and implementing a learning environment where students with various special needs receive the same teaching as other general students in one class. This research aims to understand the planning, organizing, implementing and controlling processes in inclusion classes at SMPS TPA Jember. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews and document analysis. The research subjects involved school principals, special guidance teachers, and students. The research results concluded that inclusive classroom management special in the planning stage utilizes assessments to identify classroom needs. Organization in inclusive classes aims to ensure an effective structure with clear duties and responsibilities, to provide quality education to all students. In implementing inclusive classes, the existence of Educational Operational Standards (SOP) cannot be separated because these SOPs ensure the smooth learning process in inclusive classes is in accordance with with predetermined educational standards. And control in inclusive classes involves supervision and the role of the school principal, aimed at ensuring effectiveness and efficiency in the learning process.

Key Words: management special services for inclusion classes, children with special needs

PENDAHULUAN

Pendidikan merujuk pada segala tindakan, pengaruh, dan bantuan yang diberikan kepada setiap anak. Dalam konteks ini, bantuan mencakup usaha yang diberikan kepada individu untuk membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan dalam berinteraksi dengan sesama serta mengelola aspek emosional mereka. Pendidikan secara formal adalah upaya yang disengaja untuk meningkatkan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek akademis, emosional, dan spiritual, dengan tujuan optimalisasi perkembangan mereka. Tujuannya pendidikan adalah agar anak-anak dapat mematuhi norma yang berlaku dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan melibatkan tanggung jawab terhadap semua anak, dengan pendidik memberikan panduan moral kepada mereka. Semua ini didasarkan pada strategi manajemen yang terstruktur dengan baik dalam pendidikan karakter peserta didik.¹

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam menerima pendidikan, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak kesulitan belajar, dan anak inklusi. Prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa hak dasar anak-anak merupakan hal yang mendasar karena mereka mendapatkan pendidikan yang mendorong pendidik untuk meningkatkan usaha mereka dalam memberikan akses pendidikan kepada berbagai kelompok siswa. Upaya untuk memperluas akses pendidikan ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau sekolah, melainkan juga membutuhkan kontribusi dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia.²

Rusmono menyatakan bahwa Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) umumnya mengikuti pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi dengan memberikan peluang kepada anak-anak yang memiliki kekhususan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum. Pendekatan pendidikan semacam ini dikenal sebagai pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik, termasuk yang memiliki perbedaan atau potensi istimewa, untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam konteks pendidikan inklusif, setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk menerima pendidikan, tanpa memandang keadaan khusus mereka, sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat menghadiri sekolah reguler tanpa adanya diskriminasi di sekolah tersebut.³

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan adanya penelitian secara khusus membahas tentang Manajemen Layanan Kelas Inklusi di SMPS Inklusi TPA Jember. Namun demikian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sekarang sebagai berikut :

Yang pertama "Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," yang diteliti oleh Alfiah Miftahul Jannah dan Muhammad Umam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Pendidikan Inklusi di SD Negeri 2 Barabai melibatkan delapan aspek, termasuk manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen budaya dan lingkungan sekolah, serta

¹ Suhadi Winoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta :LKiS, 2020) hlm. 29.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional*

³ Saiful Bahri, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar", *Edukatif:jurnal Ilmu Pendidikan*, vol.4, no. 1(2022) hlm. 94-100.

manajemen layanan khusus. Dari delapan aspek manajemen ini, sepertinya sekolah inklusi di SD Negeri 2 Barabai telah berhasil menerapkan pendekatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kerjasama efektif antara pemerintah dan dinas pendidikan tetap menjadi faktor penting.⁴

Kedua dalam jurnal berjudul "Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Layanan Inklusi" yang diteliti oleh Destya Wulandari, Ahmad Hamidi, dan Junaidi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai sumber daya manusia di Sekolah Melati Indonesia, Bekasi, adalah kegiatan yang berlangsung secara berkala sesuai dengan kebutuhan sekolah. Biasanya, proses ini dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru, menandai dimulainya kegiatan pembelajaran. Langkah ini sering diperlukan karena adanya pengajar yang pindah atau meninggalkan sekolah. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam merencanakan sumber daya manusia untuk sekolah inklusi di Sekolah Melati Indonesia⁵

Ketiga dalam jurnal yang berjudul "Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Inklusi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di SDS Cendana Duri," yang diteliti oleh Indah Yusmita, Mahdumdan Sri Kartikowati hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan inklusi adalah (1) perencanaan pendidikan inklusi meliputi kurikulum dan pengajaran yang berkualitas (2) pengorganisasian dilakukan dengan menunjuk koordinator pendidikan inklusi, guru kelas inklusi, guru mata pelajaran, untuk kelas inklusi (3) pembekalan dilakukan dengan motivasi, komunikasi dan kepemimpinan (4) pengendalian dilakukan setiap tiga bulan sekali.⁶

Keempat penelitian yang berjudul "Implementasi Manajemen Kelas Inklusi," yang dilakukan oleh Dwi Ayu Septia, Johan Nanda, dan Lilik Utasari, mengungkapkan bahwa kehadiran siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi telah membawa perubahan dalam orientasi dan manajemen, bukan hanya di tingkat sekolah, tetapi juga dalam manajemen kelas. Pembelajaran di sekolah inklusif memerlukan adaptasi dan penyesuaian khusus. Pembelajaran yang bermakna bukan hanya mencakup proses pengajaran atau penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pengembangan pribadi siswa, interaksi sosial, serta pembentukan sikap dan nilai-nilai siswa. Kesimpulannya adalah bahwa manajemen kelas di sekolah dasar inklusi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran, metode, strategi, pendekatan, dan evaluasi pembelajaran untuk menciptakan lingkungan kelas yang produktif, positif, kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan.⁷

Kelima Dalam penelitian berjudul "Implementasi Manajemen Kelas Inklusi" yang diselidiki oleh Suprpto, Alvin Maulana, dan Azizah Tur Rahmah, ditemukan bahwa dengan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, menciptakan iklim dan suasana psikososial dan emosional yang positif, serta mengembangkan sistem sosial yang memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Menjadi seorang guru di sekolah inklusi bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, para guru perlu meningkatkan kompetensinya dan mampu mengelola kelas tanpa bantuan guru tambahan. Selain kemampuan dalam mengelola siswa biasa, mereka juga harus menciptakan lingkungan kelas yang ramah bagi belajar yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK).⁸

⁴ Alfian Miftahul Jannah dan Muhammad Umam, "Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," Jurnal: Unesa, vol.1, no.1, (Mei 2019) hlm. 2-3.

⁵ Destia Wulandari, Ahmad Hamidi dan Junaidi, "Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Layanan Inklusi", Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam, vol.2, no.22(Januari 2019) hlm.10-11.

⁶ Indah Yusmita, Mahdum dan Sri Kartikowati, "Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Inklusi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di SDS Cendana Duri, Jurnal JUMPED vol.10 no.1, (Juni i 2022) hlm.63.

⁷ Dwi Ayu Septia dan Johan Nanda, " Implementasi Manajemen Kelas Inklusi", Jurnal : Manajemen Pendidikan Islam, vol.1, no.3, (Juni 2018) hlm. 2-4.

⁸ Suprpto, Alvin Maulana, dan Azizah Tur Rahmah, "Implementasi Manajemen Kelas Inklusi", Jurnal:IAIN

keenam dalam jurnal yang berjudul "Manajemen Layanan Kelas Inklusi di Sekolah Dasar," yang diselidiki oleh Khoiriyah, Icaa Atmalasari, dan Sugeng Adi, ditemukan bahwa di SDN Wage I, selama tiga hari siswa reguler dan siswa ABK belajar bersama dalam satu ruangan kelas yang sama. Namun, pada tiga hari berikutnya, siswa ABK dipisahkan dan diajarkan di ruang khusus yang disebut ruang sumber. Seorang guru menjelaskan, "Selama tiga hari saya mengajar di kelas, dan selama tiga hari berikutnya saya membantu di ruang sumber. Tetapi di kelas, siswa ABK harus didampingi oleh guru. Kami menyadari bahwa tidak semua keluarga mampu untuk memberikan pendampingan. Mereka yang mampu dapat menggunakan layanan shadow atau pendamping."⁹

Ketuju hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran di kelas inklusi di SD Negeri 7 Sidokumpul, Gresik" Yang dilakukan oleh Yogi Saiful Millah dan Sudrajat, menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran secara umum melibatkan beberapa aspek: (a) penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta kurikulum inklusi; (b) semua guru, termasuk guru kelas dan guru pendamping khusus, terlibat dalam proses perencanaan pembelajaran; dan (c) perencanaan pembelajaran dilaksanakan dalam tiga tahap.¹⁰

Kedelapan "Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Inklusif di Indonesia" yang dihasilkan oleh Khalizhaa Serli Puspitasari, Nayla Syarifa, dan Mahfud mendiskusikan pentingnya pendidikan inklusif sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan hak yang sama dalam proses pendidikan. Pendekatan pendidikan inklusif bertujuan untuk mempromosikan rasa saling hormat, kasih sayang, dan terutama, saling menghargai di antara peserta didik. Oleh karena itu, pemilihan model pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi peserta didik menjadi kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta memberikan kenyamanan dalam proses belajar, baik untuk peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler.¹¹

Kesembilan "Pelaksanaan manajemen kelas inklusif, seperti yang diteliti oleh Karana dan Malik Zainii, menunjukkan bahwa sekolah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif tetap menerapkan pendekatan inklusif meskipun pelaksanaannya belum mencapai standar kualitas yang optimal. Pelaksanaan sekolah inklusif yang belum sepenuhnya memadai ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk tingkat kesiapan sekolah, peraturan dan kebijakan yang ada, struktur pendidikan, kualifikasi guru, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Selain itu, faktor-faktor seperti tradisi atau budaya di sekolah dan dukungan dari orang tua dan masyarakat juga memiliki peran dalam hal ini."¹²

Kesepuluh jurnal yang berjudul "Manajemen Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan di Sekolah Inklusi" yang disusun oleh Sandi Aulia dan Hayati menyajikan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 7 Sidokumpul, Gresik, dengan fokus pada beberapa aspek utama. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mencakup; Pendidikan karakter ditekankan dengan baik dalam pembelajaran, Peran guru kelas dan guru pendamping khusus berbeda namun sejalan dalam upaya mendidik siswa sesuai dengan kebutuhan dan usia mereka, Penggunaan metode pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif oleh guru

Surakarta, vol.2, no.4,(Agustus 2019) hlm. 5-7.

⁹ Khoiriyah, Icaa Atmalasari, dan Sugeng Adi, "Manajemen Layanan Kelas Inklusi di Sekolah Dasar," Jurnal : Manajemen Pendidikan Islam, vol.1, no.1(Agustus 2018)

¹⁰ Yogi Saiful Millah dan Sudrajat, "manajemen pembelajaran di kelas inklusi di SD Negeri 7 Sidokumpul, Gresik" Jurnal :Manajemen Pendidikan Islam, no.1, vol.11, (2019) hlm. 2-4.

¹¹ Khalizhaa Serli Puspitasari, Nayla Syarifa, dan Mahfud, "Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Inklusif di Indonesia", Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam, vol.1, no.4,(2021) hlm. 1-3.

¹² Karana dan Malik Zainii, "Pelaksanaan manajemen kelas inklusif", Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam, vo.1,no.2, (2018) hlm. 5-6.

kelas.¹³

Dari uraian diatas tentang penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan yang tidak, diperlakukan dengan adil. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk menerima pendidikan yang setara dengan siswa reguler. Selain itu, pendidikan inklusif mendorong perkembangan nilai-nilai seperti saling menghormati, kasih sayang, dan yang paling penting, sikap saling menghargai di antara siswa tanpa adanya diskriminasi. Dalam melaksanakan pendidikan inklusif, penting untuk mempertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi siswa. Pemilihan model-model pendidikan inklusif yang sesuai dapat mempengaruhi kenyamanan dalam proses belajar, baik untuk siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler.

Berdasarkan paparan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang berjudul "Manajemen Layanan khusus Kelas Inklusi Di SMPS Inklusi Jember". salah satu perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada salah satu komponen dalam manajemen inklusi sedangkan dalam penelitian saat ini lebih menyeluruh dalam menjelaskan semua komponen manajemen layanan kelas inklusi. Hal ini jelas terdapat perbedaan ataupun perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan terdapat juga perbedaan tentang lokasi ataupun subjek dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

Kondisi saat kami melakukan penelitian terhadap kondisi sekolah inklusi, kami menemukan bahwa sejumlah sekolah umum juga mengadopsi program inklusi. Hal ini berdampak pada jumlah siswa yang terbatas di sekolah inklusi yang menjadi subjek penelitian kami. Terkait fasilitas, terdapat kendala dalam pengadaan dana dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak sarana dan prasarana di sekolah inklusi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagian masyarakat di sekitar cenderung memilih sekolah lain untuk anak-anak mereka karena mereka memiliki persepsi bahwa sekolah inklusi hanya ditujukan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Meskipun begitu, perbandingan pelaksanaan kurikulum di sekolah inklusi dengan sekolah umum menunjukkan kesamaan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Keunikan lainnya adalah di sekolah inklusi, tidak pernah terjadi insiden perundungan (bullying) karena siswa dianggap setara dan terjalin persahabatan yang erat diantara mereka para siswa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan ciri khusus populasi atau fenomena yang diteliti, sehingga bisa digunakan untuk identifikasi.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di lingkungan SMPS Inklusi TPA Jember. Data Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan perolehan informasi yang akurat dan valid, informasi tambahan yang mendukung hasil penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi lainnya.

¹³ Sandi Aulia dan Hayati, "Manajemen Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan di Sekolah Inklusi" *Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam*, vol.1, no.2, (2020) hlm. 4-6.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 117.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Kelas Inklusi

Inklusi merupakan konsep di mana pengajaran kepada siswa berkebutuhan khusus dilakukan dalam kelas reguler. Dalam konteks pendidikan inklusif, sekolah menyelenggarakan sistem yang ditujukan untuk anak-anak dengan kelainan atau kebutuhan khusus, menggabungkannya tanpa mempertimbangkan batasan individual masing-masing. Pendidikan inklusi memiliki ciri khas sebagai suatu proses berkelanjutan yang bertujuan menemukan metode responsif terhadap keragaman individu. Hal ini melibatkan perhatian terhadap upaya mengatasi hambatan-hambatan belajar anak dan memastikan partisipasi serta pencapaian hasil belajar yang signifikan bagi anak kecil yang berada di lingkungan sekolah.¹⁵

Adapun sejarah terbentuknya sekolah inklusi di Jember sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sulaiman S. Pd. selaku kepala sekolah sebagai berikut berikut

Terbentuknya sekolah inklusi yaitu pada tahun 2007, dimana sekolah ini berasal dari pengamatan yayasan yang melihat banyak anak-anak, terutama di daerah Jawa Timur, khusus Jember, yang terlantar tanpa akses pendidikan, termasuk anak jalanan, anak kurang mampu, dan anak disabilitas. Sebelum diterapkan sistem zonasi, pendidikan masih didasarkan pada biaya mandiri (harus membayar sendiri). Dan karena sekarang sudah diberlakukannya sistem zonasi memberikan dampak positif dengan memungkinkan anak-anak yang tinggal jauh untuk sekolah di tempat terdekat, dan juga memberikan kesempatan kepada anak jalanan, anak kurang mampu, serta anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Inilah latar belakang terbentuknya sekolah inklusi.¹⁶

Tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk menampung anak-anak jalanan, anak-anak kurang mampu, dan anak-anak disabilitas yang kurang memiliki akses pendidikan. Oleh karena itu, inti dari kelas inklusi adalah aspek sosial. Penting untuk dicatat bahwa inklusi berbeda dari sekolah konvensional atau sekolah umum biasanya karena di dalamnya terdapat pendidikan bagi anak-anak reguler dan anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam satu kelas. Penentuan apakah seorang anak termasuk dalam kategori kebutuhan khusus ditentukan oleh guru PLB melalui pengelompokan anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dikutip dari Wildan Adiarti tentang proses perencanaan kelas inklusi bahwa :

Proses perencanaan dalam kelas inklusi merupakan usaha nyata untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, mengajak anak-anak untuk menghargai dan menerima semua anggota kelas tanpa memandang perbedaan fisik, kemampuan, etnik, gender, status sosial, kemiskinan, dan sebagainya. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing siswa agar dapat saling menerima dan bekerja sama dengan semua anak yang terlibat di kelas inklusi.¹⁷

¹⁵ Muhammad Takdir Ilhahi, Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) 44

¹⁶ Sulaiman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Oktober 2023

¹⁷ Wulan Adiarti, "Implementasi Pendidikan Inklusi Melalui Strategi Pengelolaan Kelas yang Inklusi pada Guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Ngalian, Semarang", Jurnal Rekayasa Universitas Negeri Semarang, Vol. 12 No. 1 Juli 2014, hlm. 75.

Proses perencanaan di dalam kelas inklusi melibatkan asesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan yang ada di dalam kelas tersebut. Dalam kelas inklusi, terdapat guru umum dan guru pendamping untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini diperlukan karena anak-anak kebutuhan khusus biasanya memerlukan bantuan tambahan untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru umum. Sebelum pendamping dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai, penting untuk memahami jenis kelemahan yang dimiliki oleh setiap anak kebutuhan khusus tersebut.

Setelah dilakukannya observasi menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat dua siswa dengan kebutuhan khusus, dan terdapat dua guru pembimbing khusus yang tersedia di dalam kelas inklusi tersebut. Anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) dalam kelas inklusi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak-anak yang lambat belajar dan anak-anak yang menghadapi kesulitan belajar. Sebagai contoh, seorang anak mungkin terlihat seperti anak normal, tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita dapat mengidentifikasi bahwa mereka mengalami kesulitan dalam proses belajar. Setelah memahami perbedaan ini, pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

B. Pengorganisasian Kelas Inklusi

Pengorganisaian di kelas inklusi mencakup tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan persyaratan yang diperlukan untuk jabatan tertentu di lingkungan kelas inklusi. Hal ini penting karena dalam kelas inklusi dapat dipastikan bahwa kelas tersebut memiliki pembimbing yang ahli serta diperlukan dan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus¹⁸

Dalam pandangan Terry, pengaturan di dalam kelas inklusi dianggap sebagai kegiatan mendasar yang krusial untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. Ini melibatkan penyusunan semua sumber daya yang diperlukan, termasuk unsur manusia, dengan tujuan mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran¹⁹. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Suparto dkk, menjelaskan tentang pentingnya pengorganisasian dalam kelas inklusi ialah

Dengan menciptakan suasana kelas yang mendukung, membangun iklim dan suasana psikososial dan emosional yang positif, serta mengembangkan sistem sosial yang memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Menjadi seorang guru di sekolah inklusi bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, para guru perlu meningkatkan kompetensinya dan mampu mengelola kelas tanpa bantuan guru tambahan. Selain kemampuan dalam mengelola siswa biasa, mereka juga harus menciptakan lingkungan kelas yang ramah bagi belajar yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK)

Dari uraian pendapat Suparto dkk. Dapat disimpulkan bahwa Pengorganisasian dalam kelas inklusi berfungsi untuk memastikan adanya struktur yang efektif, dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pendidikan berkualitas dapat diberikan kepada semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Pengorganisasian

¹⁸ Pedoman Penyusunan Jobdesc untuk Sekolah Inklusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017).

¹⁹ M Adlin, "TANTANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI," *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2016).

dalam kelas inklusi mencakup pembagian tugas (Jobdiscreption) oleh sebagian anggota ataupun staf. ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dalam kelas.

Menurut Handoko, Jobdiscreption adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci mengenai fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek spesifik dari suatu pekerjaan.²⁰

Jobdiscreption di sekolah inklusi dapat disusun oleh sekolah tersebut sesuai dengan situasinya. Meskipun begitu, secara garis besar, job description harus mencakup elemen-elemen berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab

Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab perlu disampaikan dengan jelas dan terinci. Hal ini memiliki arti yang sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik dari anggota staf di sekolah inklusi terkait harapan yang diberikan pada mereka.

2. Kualifikasi

Kualifikasi harus dijelaskan secara rinci mencakup pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan. Ini memegang peranan penting dalam memverifikasi bahwa anggota staf di sekolah inklusi memiliki kualifikasi yang sesuai untuk Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pada mereka

3. . Kriteria penilaian kinerja

Kriteria penilaian kinerja harus dijelaskan secara jelas dan rinci. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kinerja staf sekolah inklusi dapat diukur dan dinilai secara objektif.

Adapun perekrutan sebagai pengorganisasi dikelas iinklusi, peneliti mengambil contoh guru pembimbing khusus (GBK)

- a. Tugas dan tanggung jawab guru pembimbing khusus (GBK) diantaranya

1. Memberikan informasi mengenai layanan pendidikan inklusif serta penyesuaian pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Contohnya, menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah untuk semua peserta didik dan mengelola penerimaan peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus.
2. Menyusun dokumentasi hasil identifikasi, asesmen, dan portofolio peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Proses identifikasi dan asesmen dilakukan.
4. Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap hasil pembelajaran.
5. Pengembangan kebutuhan khusus melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan program kebutuhan.

- b. Kualifikasi untuk menjadi guru pembimbing khusus disekolah inklusi:

1. Sarjana pendidikan atau bidang terkait
2. Berpengalaman mengajar minimal 2 tahun
3. Mempunyai pemahaman tentang pendidikan inklusi
4. Mampu bekerja sama dengan tim

- c. Kriteria penilaian kerja guru pembimbing khusus

1. Kemampuan dalam membimbing siswa yang memiliki kebutuhan

²⁰ Daryanto, Administrasi Pendidikan., (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 29-30.

- khusus,
2. Efektivitas dalam merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran inklusif,
 3. Kolaborasi dengan staf dan orang tua, serta kemampuan dalam mengevaluasi dan merespons kebutuhan individu siswa dengan kecerdasan yang beragam.
 4. Evaluasi juga dapat mencakup aspek komunikasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi.²¹

C. Pelaksanaan Kelas Inklusi

Umumnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas inklusi mirip dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas reguler. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalizhaa Serli Puspitasari mencatat tentang pelaksanaan kelas inklusi bahwa:

Pendidikan inklusif disusun dengan maksud memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan hak yang setara dalam rangka proses pendidikan. Pendekatan pendidikan inklusif bertujuan untuk mempromosikan rasa hormat, kasih sayang, dan terutama, saling menghargai di antara peserta didik. Karena itu, pemilihan model pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi peserta didik menjadi faktor kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta memberikan kenyamanan dalam proses belajar, baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler.

Didalam proses pelaksanaan kelas inklusi terdapat dua sampai tiga guru salah satunya terdapat guru pendamping khusus untuk anak kebutuhan khusus, Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pak toyib selaku guru pendamping kelas inklusi bahwa :

Proses pelaksanaan di SMP inklusi hampir mirip dengan SMP biasa, dengan perbedaan bahwa dalam satu kelas inklusi, terdapat dua hingga tiga pendamping. Di dalamnya terdapat guru umum yang memberikan pengajaran secara umum, dan kemudian materi tersebut akan disesuaikan oleh guru khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Namun, jika dalam kelas inklusi tidak ada siswa dengan kebutuhan khusus, maka tidak akan ada guru pendamping yang diperlukan.²²

Dalam pelaksanaan kelas inklusi, keberadaan Standar Operasional Pendidikan (SOP) sangat penting, karena melalui SOP ini, kelas inklusi dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan. SOP sekolah inklusi mencakup serangkaian petunjuk yang mengatur berbagai proses pelaksanaan pendidikan inklusif. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat berjalan lancar dan mematuhi standar yang berlaku. Berikut adalah SOP yang diterapkan dalam konteks sekolah inklusi:

²¹ Joko yuwono, " Guru Pembimbing Khusus (GBK) disekolah inklusi, (Konsep Guru pembimbing khusus/GPK)", universitas sebelas maret surakarta, (Mei, 2020) <https://jokoyuwonoautis.com/2020/05/10/guru-pembimbing-khusus-gpk-di-sekolah-inklusi-rekonsepsi-guru-pembimbing-khusus-gpk-sebuah-gagasan/diakses tanggal 10 November 2023.>

²² Toyib, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Oktober 2023

1. Penerimaan peserta didik

Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) memiliki opsi untuk diterima di sekolah inklusi melalui dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur khusus. Jalur reguler merupakan jalur penerimaan yang sama dengan peserta didik pada umumnya, sementara jalur khusus merupakan jalur penerimaan yang dirancang khusus untuk PDBK.

2. Asesmen

PDBK yang diterima di sekolah inklusi harus menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuannya. Asesmen ini dilakukan oleh tim asesmen yang terdiri dari guru, psikolog, dan tenaga ahli lainnya.

3. Penempatan

Hasil penilaian akan menentukan penempatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) pada kelas yang cocok dengan kebutuhan dan kemampuannya. PDBK dengan kebutuhan khusus ringan dapat diintegrasikan ke dalam kelas reguler, sementara PDBK dengan kebutuhan khusus berat dapat ditempatkan dalam kelas khusus.

4. Kurikulum

Peserta didik di sekolah inklusi mengikuti kurikulum yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Namun, bagi PDBK yang membutuhkan, sekolah dapat memberikan layanan tambahan berupa modifikasi kurikulum, metode pembelajaran, atau media pembelajaran.

5. Guru

Guru di sekolah inklusi harus memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusif. Guru juga harus mampu bekerja sama dengan guru pendidikan khusus (GPK) dalam memberikan layanan kepada PDBK.

6. Evaluasi

Peserta didik di sekolah inklusi dievaluasi dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan belajar PDBK dan untuk menentukan kebutuhan layanan tambahan yang diperlukan.

SOP sekolah inklusi dapat disusun oleh masing-masing sekolah, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tersebut.²³

D. Pengendalian Kelas Inklusi

Pengendalian dalam kelas inklusi tidak terlepas dari pengawasan dan peran kepala sekolah dalam kelas inklusi merupakan hal yang tak terhindarkan. Salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di kelas inklusi. Sebagai pengawas pendidikan di sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru dan staf dalam konteks penyelenggaraan, pengembangan pendidikan, dan pengajaran untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih optimal²⁴. Supervisi oleh kepala sekolah menjadi kunci untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas proses pendidikan di sekolah. ,memastikan peningkatan kualitas. Kepala sekolah dapat melaksanakan berbagai upaya, seperti memfasilitasi partisipasi guru dalam pelatihan, menugaskan mereka untuk mengikuti musyawarah guru mata pelajaran, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan disiplin guru, memberikan pembinaan kompetensi kepada

²³ Satrianawati, Pendidikan Inklusi :Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta :Dee publish 2020) hlm.31.

²⁴ Muh Ibnu Sholeh, "Peran Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Generasi Strawberry Di Madrasah," *Jes(Journal Education and Supervision)* 1, no. 1 (2023): hlm. 67–86.

kepala sekolah dari pengawas, dan mendatangkan nara sumber oleh pihak yayasan.²⁵

Evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah memiliki tujuan untuk menilai kemampuan atau prestasi yang telah diperoleh oleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah mengikuti proses pembelajaran. Guru pembimbing khusus memegang tanggung jawab dalam menilai peserta didik berkebutuhan khusus, dan mereka bekerjasama dengan guru kelas untuk melakukan penyesuaian pada sistem evaluasi sesuai dengan kebutuhan mereka.²⁶ Dalam proses pengendalian yang dilakukan oleh Sulaiman selaku kepala sekolah Inklusi TPA Jember terhadap guru pembimbing yang tidak kompeten dalam mengajar yaitu

jika ditemukan guru yang tidak memiliki kompeten dalam mengajar, kepala sekolah tidak segera memberikan sanksi tegas karena ada kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan guru tersebut berhenti. Hal ini disebabkan bahwa sekolah inklusi masih memerlukan kontribusi tenaga dari guru tersebut.²⁷

Bila terjadinya kerusakan didalam kelas inklusi yang bertanggung jawab yaitu gurunya sendiri, dan mereka sering kali menggunakan uang pribadi untuk memperbaikinya. Terkadang, ketika ada siswa baru, pembimbing atau guru juga berkontribusi dalam memberikan seragam dengan uang pribadi mereka.

Dalam melaksanakan program pendidikan inklusi di SMPS Inklusi Jember, hingga saat ini belum terdapat alokasi dana khusus dari pemerintah untuk mendukung dan membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sebagai penggantinya, sekolah memanfaatkan dan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program inklusi.

Melalui pengendalian kelas inklusi yang dilakukan oleh kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas inklusi. Sebagai hasilnya, kepala sekolah dapat membuat keputusan yang mendukung peningkatan program pendidikan inklusi.



Gambar : Kelas Inklusi TPA jember, 2023

²⁵ Gunawan, Imam. "Evaluasi program pembelajaran." *Jurnal Pendidikan* 17.1 (2011).

²⁶ Rika Widyawati "Evaluasi pelaksanaan program inklusi sekolah dasar" *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume: 4, No. 1, (Januari-Juni 2017) hlm. 109-120.

²⁷ Sulaiman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Oktober 2023

KESIMPULAN

Proses perencanaan di dalam kelas inklusi melibatkan asesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan yang ada di dalam kelas tersebut. Dalam kelas inklusi, terdapat guru umum dan guru pendamping untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini diperlukan karena anak-anak kebutuhan khusus biasanya memerlukan bantuan tambahan untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru umum. Sebelum pendamping dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai, penting untuk memahami jenis kelemahan yang dimiliki oleh setiap anak kebutuhan khusus tersebut. Pengorganisaian di kelas inklusi mencakup tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan persyaratan yang diperlukan untuk jabatan tertentu di lingkungan kelas inklusi. Hal ini penting karena dalam kelas inklusi dapat dipastikan bahwa kelas tersebut memiliki pembimbing yang ahli serta diperlukan dan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Proses pelaksanaan di SMP inklusi hampir mirip dengan SMP biasa, dengan perbedaan bahwa dalam satu kelas inklusi, terdapat dua hingga tiga pendamping. Di dalamnya terdapat guru umum yang memberikan pengajaran secara umum, dan kemudian materi tersebut akan disesuaikan oleh guru khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pengendalian dalam kelas inklusi tidak terlepas dari pengawasan serta peran dari kepala sekolah, Salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi serta mengevaluasi proses pembelajaran dikelas inklusi. jika ditemukan guru yang tidak memiliki kompeten dalam mengajar, kepala sekolah tidak segera memberikan sanksi tegas karena ada kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan guru tersebut berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia,Sandi dan Hayati."Manajemen Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan di Sekolah Inklusi".Jurnal:Manajemen Pendidikan Islam.vol.1, no.2.(2020).
- Bahri,Syaiful."Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar".Edukatif:jurnal Ilmu Pendidikan.vol.4,no.1.(2022).
- Daryanto, Administrasi Pendidikan., (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Gunawan, Imam. "Evaluasi program pembelajaran." Jurnal Pendidikan 17.1 (2011).
- Ihahi, Muhammad Takdir. Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Jannah,Alfian Miftahul dan Muhammad Umam."Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar."Jurnal: Unesa, vol.1,no.1.Mei 2019.
- Karana dan Malik Zainii."Pelaksanaan manajemen kelas inklusif".Jurnal: Manajemen Pendidikan IslamIslam. vo.1,no.2.(2018).
- Khoiriyah, Icaa Atmalasari dan Sugeng Adi."Manajemen Layanan Kelas Inklusi di Sekolah Dasar".Jurnal : Manajemen Pendidikan Islam, vol.1,no.1.Agustus 2018.
- Millah, Yogi Saiful dan Sudrajat."manajemen pembelajaran di kelas inklusi di SD Negeri 7 Sidokumpul,Gresik".Jurnal :Manajemen Pendidikan Islam.no.1,vol.11.(2019).
- Moleong Lexy J. Moleon.Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Pedoman Penyusunan Jobdesc untuk Sekolah Inklusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017).
- Puspitasari, Khalizhaa Serli, Nayla Syarifa dan Mahfud. "Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Inklusif di Indonesia". *Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam*. vol.1, no.4. (2021).
- Rika Widyawati "Evaluasi pelaksanaan program inklusi sekolah dasar" *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume: 4, No. 1, (Januari-Juni 2017) 109-120
- Satrianawati, Pendidikan Inklusi : Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta : Dee publish 2020)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- Septia, Dwi Ayu dan Johan Nanda. " Implementasi Manajemen Kelas Inklusi". *Jurnal : Manajemen Pendidikan Islam*, vol.1, no.3. Juni 2018.
- Sulaiman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Oktober 2023.
- Suprpto, Alvin Maulana dan Azizah Tur Rahmah. "Implementasi Manajemen Kelas Inklusi". *Jurnal: IAIN Surakarta*, vol.2, no.4. Agustus 2019.
- Toyib, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Oktober 2023.
- Wulandari, Destia. Ahmad Hamidi dan Junaidi. "Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Layanan Inklusi". *Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam*. vol.2, no.22. Januari 2019.
- Winoto, Suhadi. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta : LKiS, 2020)
- Yusmita, Indah. Mahdum dan Sri Kartikowati. "Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Inklusi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di SDS Cendana Duri, *Jurnal JUMPED* vol.10 no.1, Juni i 2022.
- yuwono, joko. " Guru Pembimbing Khusus (GBK) disekolah inklusi, (Konsep Guru pembimbing khusus/GPK)", universitas sebelas maret surakarta, (Mei, 2020) <https://jokoyuwonoautis.com/2020/05/10/guru-pembimbing-khusus-gpk-di-sekolah-inklusi-rekonsepsi-guru-pembimbing-khusus-gpk-sebuah-gagasan/diakses tanggal 10 November 2023>.